

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Profil Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

a. Keadaan Geografis

Kecamatan Besuki merupakan salah satu Kecamatan yang ada di sebelah selatan Kabupaten Tulungagung. Luas wilayah Kecamatan Besuki adalah 83,66 Km dengan batasan-batasannya yaitu sebelah utara adalah Kecamatan Bandung, sebelah belah timur Kecamatan Campurdarat, sebelah Selatan Samudra Indonesia, dan sebelah barat perbatasan dengan Kabupaten Trenggalek.

Dari seluruh desa yang ada di kecamatan Besuki yang mempunyai wilayah terluas adalah Desa Keboireng dengan luas 29,42 Km sedangkan yang mempunyai wilayah terkecil adalah Desa Wateskroyo dengan luas 1,65 Km. Apabila di lihat dari jarak ke Ibukota Kecamatan desa Tulungrejo mempunyai jarak yang paling jauh yaitu 9 Km. Ibukota kecamatan berada di Desa Besuki, sedangkan kantor desa yang memilki jarak terdekat dengan kantor kecamatan Besuki adalah kantor desa Tanggulwelahan. Sedangkan menurut statusnya 10 desa di kecamatan ini berstatus desa semua. Berdasarkan data dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec.

Besuki, apabila dilihat dari penggunaannya, sebagian besar wilayah di kecamatan Besuki merupakan hutan, yaitu seluas 2.950 Ha. Penggunaan lahan untuk sawah seluas 1.015 Ha, terbagi atas tanah sawah dengan pengairan teknis, setengah teknis, sederhana dan tadah hujan. Sedangkan untuk tanah kering seluas 7.351 Ha terbagi atas pekarangan, tegal, ladang, hutan dan lain-lain.

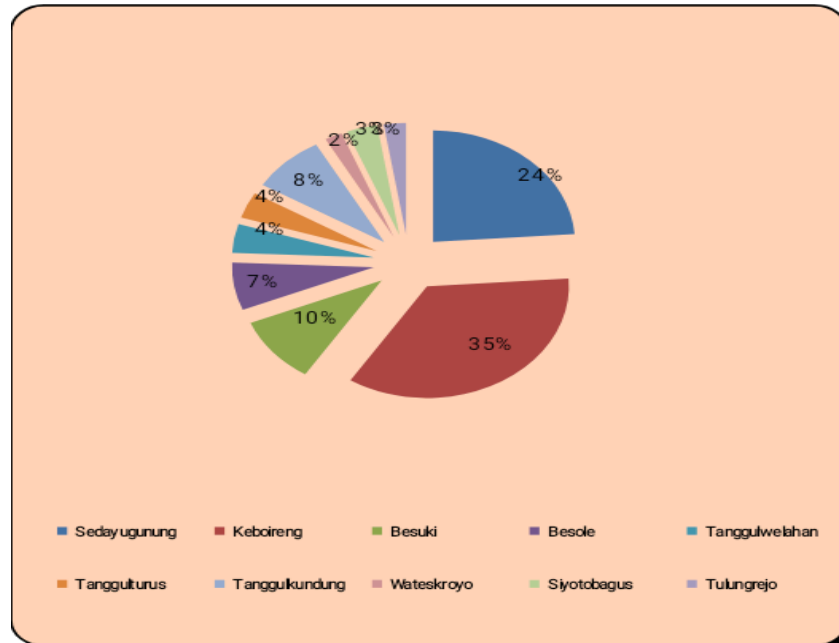
Gambar 4.1 Peta Kecamatan Besuki



Sumber: <https://tulungagungkab.bps.go.id>

Gambar 4.2

Persentase luas wilayah Desa terhadap Kecamatan Besuki



Sumber: Monografi Desa kecamatan Besuki.

b. Penduduk

Kecamatan Besuki mencakup 10 des, yaitu: Desa Besole, Desa Besuki, Desa Keboireng, Desa Sedayugunung, Desa Tanggulwelahan, Desa Tanggulturus, Desa Tanggulkundung, Desa Siyotobagus, Desa Wateskroyo, dan Desa Tulungrejo.

Tabel 4.1

Jumlah Desa, Luas Wilayah total Area, Jumlah Dusun, Rukun
Warga (RT), dan Rukun Tetangga (RT) Tahun 2018

No	Desa	Luas Km ² total area	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Sedayugunung	19.99	3	4	11
2.	Keboireng	29.42	1	2	15
3.	Besuki	8.11	2	4	32
4.	Besole	5.77	3	8	44
5.	Tanggulwelahan	3.51	2	4	30
6.	Tanggulturus	3.14	2	4	20
7.	Tanggulkundung	7.04	2	4	26
8.	Wateskroyo	1.65	2	6	18
9.	Siyotobagus	2.92	2	4	16
10.	Tulungrejo	2.11	2	4	13
Total		83.66	21	44	225

Sumber: BPS Kantor Kecamatan Besuki

Dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Besuki yang mempunyai wilayah terluas adalah Desa keboireng dengan luas 29,42 Km² dan yang mempunyai wilayah tersempit adalah Desa wateskroyo dengan luas 1,65 Km².

Unit Pemerintahan Daerah di bawah kabupaten secara langsung adalah kecamatan. Kecamatan Besuki terbagi habis ke dalam 10 desa, 21 dusun, 44 Rukun Warga (RW) dan 225 Rukun Tetangga (RT). Desa yang mempunyai jumlah RT terbanyak adalah desa Besole sebanyak 44 RT, sedangkan yang mempunyai jumlah RT paling sedikit adalah desa Sedayugunung sebanyak 11 RT.

Penduduk kecamatan Besuki tahun 2017 menurut hasil proyeksi data Sensus Penduduk (SP) tahun 2010 adalah sebanyak 34,886 jiwa, yang terbagi atas laki-laki 17,431 jiwa dan perempuan 17,455 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 416 jiwa/Km².⁹⁵

2. Profil Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

a. Sejarah Perkembangan BUMDesma Kecamatan Besuki

Wilayah Besuki terdiri dari daratan, pegunungan dan pantai. Kecamatan Besuki terdiri dari 10 desa dengan kondisi geografis yang berbeda, besuki telah berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan sejak tahun 2009. hingga saat ini kecamatan besuki telah mendapatkan dana bantuan langsung untuk masyarakat (BLM) sebesar Rp. 4.768.361.500,- (Tahun 2009 Rp. 900.000.000,- , Tahun 2010 Rp. 1.000.000.000,- ,Tahun 2011 Rp. 1.000.000.000,- , Tahun 2012 Rp 600.000.000,- , Tahun 2013 sudah cair 100% yaitu sebesar Rp. 700.000.000,-, dan Tahun 2014 sudah cair 100% yaitu sebesar Rp 568.361.500,-). Tahun 2015 secara aturan program, kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan memasuki tahap pengakhiran dan Penataan Kelembagaan sampai dengan Tahun 2017. Tahun 2018 Kelembagaan ex-PNPM secara resmi telah berubah menjadi BUMDesa Bersama (Badan Usaha

⁹⁵ BPS Kabupatena Tulungagung, *Kecamatan Besuki dalam Angka 2019*, Cet: CV. Azka Putra Pratama.

Milik Desa Bersama).⁹⁶

Sejarah awal mula perintisan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Kecamatan Besuki dirintis pada tahun 2018 yang merupakan transformasi dari hasil program PNPM Mandiri Perdesaan. Secara akumulatif dari awal mendapatkan BLM hingga tahun 2014, sebagian besar dana BLM di kecamatan besuki yaitu sekitar 75% dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung kegiatan di bidang sarana dan prasarana dan 25% untuk kegiatan ekonomi (Simpan Pinjam Khusus Perempuan). Asset yang telah ada saat ini murni dikelola untuk kegiatan ekonomi masyarakat Simpan Pinjam petemuan (SPP). Di Program Bumdes Bersama direncanakan untuk pengembangan kegiatan usaha yang lain untuk meningkatkan perolehan asset yang ada.

Berikut adalah Tabel 4.2 tentang data yang dipinjam oleh kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) periode s/d 30 April 2020 dalam pelaksanaan pengelolaan operasional dalam BUMDesma Besuki.

⁹⁶ Buku Panduan BUMDesma Besuki, tahun 2018

Tabel 4.2
Pinjaman Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
BUMDesma Kecamatan Besuki
Periode s/d April 2020

No	Desa	Pinjaman bulan April 2020	Jumlah Perkembangan Kelompok SPP			Total Kelompok yang di layani
			Awal	Pemula	Berkembang	
1.	Sedayugunung	-	1	0	0	0
2.	Keboireng	61.900.000	1	1	2	3
3.	Besuki	162.400.00	1	3	3	6
4.	Besole	404.259.000	1	17	6	23
5.	Tanggulwelahan	14.500.000	1	0	1	1
6.	Tanggulturus	46.360.000	1	3	2	5
7.	Tanggulkundung	45.470.000	1	1	3	4
8.	Wateskroyo	43.390.000	1	3	2	5
9.	Siyotobagus	194.860.000	1	4	3	7
10.	Tulungrejo	42.800.000	1	1	1	2
TOTAL		1.015.939.000	10	33	23	56

Sumber: BUMDesma Kecamatan Besuki

Badan Usaha Milik Desa Bersama Besuki mempunyai unit usaha yang sudah di rintis sejak sampai sekarang ini adalah:

1. Unit Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat yang bergerak dalam bidang microfinance dengan menyediakan kebutuhan modal mitra usaha masyarakat yang ada di desa.
2. Unit penyediaan alat tulis kantor (ATK) online untuk penyediaan alat tulis kantorpada Balai Desa yang ada di Kecamatan Besuki.

b. Visi dan Misi BUMDesma Besuki

Visi dari lembaga ini adalah Menciptakan tumbuhnya perekonomian Masyarakat Kecamatan Besuki yang mandiri di

dukung dengan tersendirinya sarana dan prasarana sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan mereka.

Misi dari Lembaga ini adalah:

- 1) Membantu masyarakat dengan menyediakan modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Besuki.
- 2) Mendorong masyarakat untuk berinisiatif dalam pengembangan usaha.
- 3) Pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat Kecamatan Besuki untuk berusaha meningkatkan pendapatan dengan pelatihan wirausaha.

c. Struktur Organisasi BUMDesma Besuki

Tabel 4.3
Struktur Organisasi BUMDesma Besuki
Pembina BUMDesma Besuki

Camat Besuki: Drs. Sugiyanto, M.M

Pengurus BKAD BUMDesma Besuki

Ketua	Marnu, M.MPd
Sekretaris	Siham
Bendahara	Ruri Priyadi

Pengelolla Pelaksanaan (Direksi) BUMDesma Besuki

Direksi/Ketua	Dini Putri Minanti
Kabag. Umum/Sekertaris	Budi Prasetyo
Kabag.Keuangan/Bendahara	Syamsu Hidayati

Badan Pengawas BUMDesma Besuki

Ketua	Siti Retno Asih
Anggota	Drs.Kanafi
Anggota	Suraji, S.Pd

Tim Verivikasi Perguliran SPP

Anggota 1	Ama Zunaidah, ST
Anggota 2	Peni Sihlaras, S.Pd

d. Tugas Pokok Pengurus BUMDesma Besuki

1. Pembina BUMDesma Besuki:

- a) Camat atas nama Bupati disepakati oleh forum MAD sebagai penasehat/pembina.
- b) Pembina tidak mempunyai hak memilih dan dipilih dalam Forum MAD.
- c) Pembina dapat memberikan saran/anjuran kepada pengurus untuk kemajuan BKAD baik diminta maupun tidak diminta.

2. Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) BUMDesma Besuki:

- a) Ketua: bertindak sebagai penanggung jawab secara menyeluruh pengelolaan kegiatan kerjasama antar desa.

- b) Sekertariat: untuk bertugas mengerjakan urusan administrasi kesekretariatan dan membuat laporan pengelolaan seluruh kegiatan dan laporan rekapitulasi seluruh aktifitas.
 - c) Bendahara: mengelola keuangan Operasional BKAD dan menyusun laporan keuangan.
3. Pengelola Pelaksanaan (Direksi) BUMDesma Besuki:
- a) Direktur/ketua:
 - 1) Memimpin rapat/pertemuan BUMDes Bersama mewakili organisasi dalam pertemuan dengan aparat terkait.
 - 2) Menyetujui atau menolak pengajuan dana baik dari sekretaris maupun bendahara.
 - 3) Menandatangani surat-surat laporan, pencairan dari bank, pembukuan rekening, pencairan dana ke anggota kelompok, kuitansi-kuitansi dan perjanjian dengan pihak lain, specimen rekening dana BUMDes Bersama, dan dana pengembalian.
 - b) Sekertaris:
 - 1) Bertanggungjawab atas segala kearsipan dokumen baik yang menyangkut masalah keuangan BUMDes Bersama dan proses kegiatan BUMDes Bersama.
 - 2) Menempelkan/memberikan informasi tentang pertanggung jawaban keuangan, informasi kegiatan kepada masyarakat melalui papan informasi dan media informasi lainnya.

- 3) Mencatat proses dan hasil keputusan rapat.
 - 4) Mengisi dan mencatat agenda harian.
 - 5) Bertindak sebagai humas bila Direktur berhalangan.
 - 6) Mengelola inventaris.
 - 7) Merencanakan pengadaan administrasi kantor.
 - 8) Membuat surat.
- c) Bendahara:
- 1) Mencatat setiap transaksi keuangan.
 - 2) Membuat laporan keuangan.
 - 3) Memegang dan menyimpan semua rekening bank dan BUMDes Bersama.
 - 4) Memegang dan menyimpan uang kas atas persetujuan Direktur.
 - 5) Membuat perencanaan keuangan dan anggaran atas persetujuan Direktur.
 - 6) Mengisi form-form laporan keuangan.
 - 7) Menyetor dan mengambil uang di bank atas persetujuan Direktur.
 - 8) Menandatangani kwitansi atas persetujuan Direktur.
 - 9) Mencatat transaksi tabungan anggota kelompok.
- d) Pengawas BUMDesma Besuki Mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan dan kinerja pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.

Pengawas dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan sebagai:

- 1) Meminta laporan pertanggungjawaban pelaksana operasional setiap akhir tahun.
 - 2) Meminta laporan kegiatan unit-unit usaha Milik Desa.
 - 3) Meminta laporan rincian neraca rugi laba dan penjelasanpenjelasn atas dokumen kegiatan unit-unit usaha.
 - 4) Pengangkatan dan pemberhentian pengurus/pelaksana operasional.
- e) Tim Verifikasi Perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP):

1) Ketua:

- a) Memimpin rapat/musyawarah Tim Verifikasi.
- b) Bertanggungjawab pengendalian kualitas proses Verifikasi.
- c) Menyampaikan rekomendasi dalam MAD.
- d) Merumuskan strategi kegiatan Verifikasi yang dituangkan dalam kerja Verifikasi.

2) Anggota:

- a) Melakukan tugas verifikasi sesuai dengan SOP.
- b) Bertanggungjawab pada kualitas Verifikasi sesuai keahlian dan kemampuan.

- c) Membuat catatan-catatan penting hasil setiap tahapan sebagai bahan referensi dalam membuat rekomendasi akhir.
- d) Mengikuti pembekalan pra tugas dan pertemuan verifikasi.

B. Temuan Penelitian

Pada hasil temuan penelitian ini disajikan oleh peneliti sesuai dengan fokus peneliti:

1. Pengelolaan BUMDesma Besuki dalam Peningkatan Usaha

Masyarakat Ekonomi Mikro.

Dari pengelolaan BUMDes Permendesaaan No.4 tahun 2015 tentang mengatur secara jelas mengenai pengelolaan teknis pelaksanaan BUMDes disertai dengan peran dan fungsi dari masing-masing perangkat BUMDes. Dari pengelollan BUMDes yang harus dikelolasecara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki ahli kompetensi untuk mengelolanya. Dalam perekrutan pegawai ataupun manager harus disesesuaikan pada stantar yang sudah ditetapkan dari anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga.

Badan Usaha Milik Desam Bersma Besuki dari upaya usahanya meningkatkan perekonomian masyarakat salah satunya adalah Ekonomi Mikro Kecil Menengah dimana kegiatan ini merupakan

kegiatan peminjaman modal kepada para wirausaha ekonomi mikro kecil menengah yang memiliki jenis usaha yang sama, dalam membentuk suatu kelompok usaha desa yang harus dibolehkan hanya kaum wanita atau perempuan untuk bisa terbentuknya kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Berikut wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bu. Dini Putri Minanti selaku Direktur Utama bagian pengelolaan BUMDesma Besuki dalam peningkatan Ekonomi Masyarakat? Beliau mengatakan bahwa:⁹⁷

“Di BUMDesma ini kami memberikan pendanaan bagi masyarakat yang telah memiliki usaha kecil menengah untuk para ibu rumah tangga yang ingin menambah modal untuk usahanya dengan bunga yang rendah yaitu 1,5%. Kemudian BUMDesma Besuki juga menyediakan alat tulis kantor (ATK) online untuk penyediaan kantor desa kami juga melakukan pembinaan serta pengembangan usaha antara lain dengan cara mengajarkan bagaimana cara untuk bisa mengembalikan uang atau pinjaman modal”.

Begitu pula yang dilakukan oleh ibu Nurul Hidayah salah satu masyarakat kecamatan Besuki sebagai anggota SPP, sebagai berikut:⁹⁸

“Baik mbak, dari BUMDesma Besuki memberikan dana pinjaman yang mudah dan juga bunga yang rendah sebesar 2%, Badan Usaha Milik Desa juga mengajak untuk bekerjasama dalam pembinaan atau pengarahan serta pengembangan usaha dengan cara mengajarkan cara untuk bisa mengembalikan uang atau pinjaman modal. Kemudian BUMDesma itu juga memberikan motivasi yang bertujuan untuk mendorong kemajuan usaha dari salah satu masyarakat setempat”.

⁹⁷ Wawancara dengan Bu. Dini Putri Minanti Direktur Utama Badan Usaha Milik Desa Bersama Besuki, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, pukul 10.20 WIB.

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu Nurul Hidayah anggota SPP BUMDesma Besuki, pada hari Selasa 11 Agustus 2020, pukul 13.00 WIB.

Kemudian timbul lagi pertanyaan yang ditunjukkan ke Bu. Dini Putri Minanti: “Apakah ada batasan umur untuk bergabung sebagai anggota Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)”⁹⁹

“Ada batasannya mbk disini kami membatasi usia 17 tahun sampai usia 55 tahun sebagaimana ketentuan yang ada di BUMDesma ini hanya seorang wanita yang produktif menjalankan usaha atau bisnis”.

Kemudian timbul pertanyaan lagi: “Apakah warga masyarakat disekitar sini juga mendukung adanya program Simpan Pinjam Perempuan”¹⁰⁰

“Iya mbk, Alhamdulillah sangat mendukung sekali dengan adanya program SPP ini masyarakat bisa mandiri menjalankan usahanya agar penambah modal untuk usahanya dapat berjalan dengan tujuan yang diinginkan. Pinjaman ini hanya untuk para warga perempuan agar tidak terjadinya pengangguran dan juga agar mendapatkan kesibukan yang mana juga mendapatkan penghasilan”.

Kemudian timbul pertanyaan lagi: “Usaha apa saja yang di jalankan oleh warga masyarakat perempuan khususnya pada anggota kelompok SPP”¹⁰¹.

“Ada beberapa usaha mbk seperti dagang, petani, pabrik marmer, nelayan, peternakan. Mayoritas masyarakat anggota SPP disini itu kebanyakan dagang dan petani mbk”.

Dari Penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Besukini sudah bisa dikatakan maksima. BUMDesma Besuki ini juga mampu bekerjasama

⁹⁹ Wawancara dengan Bu. Dini Putri Minanti Direktur Utama Badan Usaha Milik Desa Bersama Besuki, pada hari 10 Agustus 2020, pukul 10.29 WIB.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Wawancara dengan Bu. Dini Putri Minanti Direktur Utama Badan Usaha Milik Desa Bersama Besuki, pada hari 10 Agustus 2020, pukul 10.32 WIB.

dengan masyarakat tentunya bagi masyarakat perempuan, yaitu: memberikan dana serta memberikan permodalan untuk masyarakat yang ingin menjalankan usaha Ekonomi Mikro tersebut. Selain itu juga memberikan pengarahan cara mengembalikan pinjaman modal atau uang tersebut agar tidak terjadi penunggakan. Kemudian BUMDesma Besuki menyediakan alat tulis kantor (ATK) online yang dimana untuk penyediaan keperluan kantor Desa yang ada di Kecamatan Besuki. BUMDesma Besuki ini membatasi usia peminjam dana dengan batasan minimal 17-55 tahun yang di khususkan hanya wanita saja, selain itu warga masyarakat kecamatan Besuki juga mendukung adanya Simpan Pinjam di BUMDesma Besuki dengan memberikan kemudahan untuk meminjam dengan bunga yang rendah yaitu 1,5%.

2. Peran BUMDesma dalam Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Peran disini yaitu suatu bentuk tanggung jawab yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Jika seseorang telah melaksanakan hak serta kewajibannya itu berarti seseorang tersebut telah menjalankan suatu peran. Peran diartikan sebagai fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.

Badan Usaha Milik Desa Bersama adalah badan usaha milik dua desa atau lebih yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan

bersama. Dimana desa-desa bekerjasama membuat peraturan kepala desa untuk mendirikan badan usaha yang mana guna untuk mendapatkan laba/keuntungan. Bahwasannya bentuk-bentuk potensi usaha yang dikembangkan di BUMDesma sendiri yakni bukan hanya berupa sumber daya dana namun juga ada segi sosial, pengelola dan kelompok masyarakat. Dan juga dari BUMDesma sendiri menerapkan sistem bahwa hasil dari pengelolaan usaha tidak 100% untuk hanya mendapatkan laba/keuntungan saja. Namun juga untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat seperti halnya mengadakan pelatihan, pembinaan serta study banding dan penyuluhan guna memotivasi warga masyarakat untuk mendirikan suatu usaha atau mengembangkan usah mikro.

Badan Usaha Milik Desa Bersama menjadikan salah satu bentuk Badan Usaha yang telah berperan dalam proses pembangunan nasional. Dengan melalui badan usaha ini, pemerintah desa dapat dengan mudah menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam peningkatan perekonomian. pada pelaksanaanya, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Selain itu peran dari masyarakat setempat juga sangat dibutuhkan agar tujuan dari berdirinya badan usaha tersebut menjadi tepat sasaran.

Berikut wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bu. Dini Putri Minanti selaku Direktur Utama, untuk mengetahui Peran

BUMDesma Besuki Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat usaha Ekonomi Mikro. Beliau mengatakan bahwa:¹⁰²

“Peran yang kami berikan yaitu program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan memberikan Pinjaman yang diberikan hanya perempuan saja, serta kegiatan sosialisasi seperti kegiatan penyuluhan tentang wirausaha yang mana tujuannya untuk memotivasi khususnya warga perempuan Besuki supaya tergerak hatinya untuk melatih keterampilan atau skill sesuai dengan keahlian itu masing-masing. Yang mana semua itu guna untuk mengangkat perekonomian masyarakat Besuki serta meningkatkan pendapatan rumah tangga.”

Kemudian timbul pertanyaan: “ siapa saja yang terlibat dalam kepengurusan BUMDesma Besuki?” Bu. Dini Putri Minanti menjawab:¹⁰³

“Beberapa diantaranya Pengurus BKAD BUMDesma Besuki, Pengelola Pelaksana (Direksi) BUMDesma Besuki, Badan Pengawas BUMDesma Besuki, Tim Verifikasi Perguliran SPP, dan yang terakhir Penasihat/Komisaris”.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Ama Zunaidah, ST. Selaku Tim verifikasi BUMDesma Besuki, Untuk Mengetahui Peran BUMDesma Besuki Dalam Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan. Beliau mengatakan bahwa:¹⁰⁴

“Dengan Program penerapan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) memberikan kegiatan sosialisasi seperti penyuluhan mbak, memberi arahan kepada masyarakat bagaimana melatih keterampilan warga masyarakat untuk meningkatkan perekonomian warga tersebut, kebanyakan yang mengikuti sebagai anggota SPP itu kelompok arisan dan Ibu PKK ”

¹⁰² Wawancara dengan Bu. Dini Putri Aminanti Direktur Utama Badan Usaha Milik Desa Bersama Besuki, pada hari Senin 10 Agustus 2020, pukul 10.45 WIB.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Ama Zunaidah, ST Tim Verifikasi Badan Usaha Milik Desa Bersama Besuki, pada hari 10 Agustus 2020, pukul 08.00 WIB.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti kepada ibu Wiwin Rina selaku masyarakat kecamatan Besuki. Menurut Ibu Wiwin Rina anggota SPP. terkait peran BUMDesma Besuki dalam Implementasi Program Simpan Pinjam, adalah sebagai berikut:¹⁰⁵

“Peran dari BUMDesma itu ya mendirikan unit Simpan Pinjam perempuan (SPP) serta kegiatan sosialisasi seperti penyuluhan, membantu cara mengelola keuangan, serta mengatasi pengangguran bagi perempuan”.

Lalu Timbul pertanyaan lagi kepada Ibu Wiwin Rina anggota SPP: “dari program Badan Usaha Milik Desa Bersama Besuki itu apa bermanfaat bagi ibu”.¹⁰⁶

“Tentunya sangat bermanfaat mbk, dari BUMDesma Besuki memberikan pendanaan atau pinjaman untuk modal usaha saya, dan juga memotivasi kepada saya bahwa adanya potensi yang ada di dirisaya untuk mengembangkan Usaha Ekonomi Mikro”.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti kepada Pak.Siham selaku sekretaris di BUMDesma, Untuk Mengetahui Peran BUMDesma Besuki Dalam Program Implementasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Beliau mengatakan bahwa:¹⁰⁷

“Bahwa dalam peran BUMDesma Besuki ini mendirikan Program Implementasi SPP memberikan pendanaan dengan cara terbentuknya kelompok per desa yaitu per kelompok masing masing terdapat minimal Rp. 2.000.000,- maksimal Rp. 7.000.000,- sebagai anggota SPP khusus untuk perempuan di usia 17-55, serta memberikan sosialisasi serta motivasi kepada warga masyarakat Besuki agar lebih mengerti apa keahlian warga yang bisa berdampak baik dalam meningkatkan pendapatan”.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Danah ketua kelompok anggota SPP BUMDesma Besuki, pada hari Selasa 11 Agustus 2020, pukul 13.00 WIB.

¹⁰⁶ *Ibid.*,

¹⁰⁷ Wawancara dengan Pak.Siham Pengelola BUMDesma Besuki, pada hari Rabu Agustus 2020, pukul 10.20 WIB.

Dari penjelasan diatas bahwa peran BUMDesma Besuki dalam program Implementasi SPP ini sangat cukup baik, yaitu dengan di lakukan adanya Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan dengan memberikan pendanaan atau modal Usaha perekonomian serta melakukan kegiatan sosialisasi seperti kegiatan penyuluhan tentang wirausaha yang mana tujuannya untuk memotivasi khususnya warga Kecamatan Besuki supaya tergerak hatinya untuk melatih keterampilan atau skill sesuai dengan keahlian itu masing-masing. Yang mana semua itu guna untuk mengangkat perekonomian masyarakat serta menyejahterakan masyarakat dan pengurangan pengangguran. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam kepengurusan BUMDesma Besuki ini yakni antara lain, diantaranya Pengurus BKAD BUMDesma Besuki, Pengelola Pelaksana (Direksi) BUMDesma Besuki, Badan Pengawas BUMDesma Besuki, Tim Verifikasi Perguliran SPP. Dari masing masing anggota SPP ini terdapat terbentuknya kelompok desa, kebanyakan yang di ikuti oleh ibu ibu arisan dan ibu PKK. Dari masing masing desa harus dapat terbentuknya kelompok Simpan Pinjam Perempuan dengan minimal 5 dan maksimal 12 Kelompok.

3. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Dari Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang memiliki kegiatan simpan pinjam. Program simpan pinjaman perempuan adalah kegiatan yang direncanakan oleh suatu lembaga

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Dari suatu kegiatan Simpan Pinjam tentunya terdapat adanya mekanisme untuk pencapaian suatu proses berjalannya memberikan pendanaan. Oleh sebab itu pihak BUMDesma Besuki ini menerapkan mekanisme, penjelasan dari pihak BUMDesma yang dilakukan oleh wawancara peneliti sebagai berikut:

“Yang dilakukan oleh peneliti dengan Bu.Dini Putri Minanti selaku Direktur Utama, untuk mengetahui bagaimana Mekanisme dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan”.¹⁰⁸

“Dari ketentuan Simpan Pinjam BUMDesma ini ada beberapa tahapan mekanisme mbk, yang pertama (1) Pengajuan Proposal dengan dilakukan secara berkelompok desa, (2) Proses verifikasi, dari proses ini selaku tim verifikasi melakukan memverifikasi hasil proposal di persetujui atau tidaknya(3) Rapat pendanaan, dari rapat pendanaan ini di ikuti seluruh anggota kelompok SPP pada per kelompok atau per desa saja (4) Pencairan dana ini harus bersifat terbuka dan harus datang karena sebagai bukti, orang yang meminjam dana kalo tidak datang pencairan dana tidak bisa di laksanakan”.

Kemudian di lanjutkan wawancara lagi kepada Ibu Syamsu Hidayati selaku Bendahara di BUMDesma Besuki: “apakah ada batasan maksimal pinjaman”.¹⁰⁹

“ada batasan dan maksimal mbk, maksimal pinjaman untuk kelompok baru sebesar Rp. 2.000.000,00 kalo kelompok lama sebesar Rp. 7.000.000,00 dengan batasan usia 17-55 mbk”.

Selanjutnya peneliti bertanya lagi mewawancarai dengan Bu Dini Putri Minanti. “apa saja persyaratan yang dilakukan oleh peminjam dana”.¹¹⁰

¹⁰⁸Wawancara dengan Bu. Dini Putri Minanti Direktur Utama BUMDesma Besuki, pada hari Senin 10 Agustus 2020, pukul 10.50 WIB.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ibu Syamsu Hidayati Bendahara Pengelola BUMDesma Besuki, pada hari senin 10 Agustus 2020, pukul 11.00 WIB.

“Ada ketentuan 9 persyaratan mbk, yaitu: Profil Kelompok, Daftar calon pemanfaatan dan perguliran, Rencana Angsuran kredit kelompok, RUK (Rencana Usaha Kelompok), Persyaratan kesediaan tanggung renteng dari seluruh anggota., Foto copy KTP anggota kelompok + KTP Suami/ Anggota Keluarga sebagai pihak penanggung, Surat persetujuan Suami/ Keluarga dari anggota kelompok, Berita acara Musyawarah Kelompok (lengkap dengan daftar hadir dan notulen), Foto copy bukti tabungan kelompok di Bank (jika ada) itu saja mbk persyaratannya”

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwasannya di BUMDesma Besuki terdapat ada beberapa ketentuan mekanisme atau proses yang dilakukan sebagai anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini ada 4 tahapan yaitu: (1) Pengajuan Proposal, (2) Proses verifikasi, (3) Rapat pendanaan, (4) Pencairan dana. Adapun 9 persyaratan yang harus dilakukan oleh si peminjam modal yaitu: (1) harus ada Profil Kelompok, (2) Daftar calon pemanfaatan dan perguliran, (3) Rencana Angsuran kredit kelompok. (4) RUK (Rencana Usaha Kelompok), (5) Persyaratan kesediaan tanggung renteng dari seluruh anggota, (6) Foto copy KTP anggota kelompok + KTP Suami/ Anggota Keluarga sebagai pihak penanggung, (7) Surat persetujuan Suami/ Keluarga dari anggota kelompok, (8) Berita acara Musyawarah Kelompok (lengkap dengan daftar hadir dan notulen), (9) Foto copy bukti tabungan kelompok di Bank (jika ada).

4. Faktor penghambat Internal dan Eksternal BUMDesma Besuki dalam Implementasi program Simpan Pinjam Perempuan.

¹¹⁰ Wawancara dengan Bu. Dini Putri Minanti Direktur Utama Pengelola BUMDesma Besuki, pada hari Senin Agustus 2020, pukul 10.20 WIB.

Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam proses meningkatkan ekonomi masyarakat, maka peneliti melakukan wawancara. Berikut wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Pak Agung Ariwibowo selaku Direktur Utama, untuk mengetahui Problem atau Kendala yang Dihadapi BUMDesma Besuki dalam Meningkatkan Ekonomi. Berikut yang dilakukan wawancara oleh peneliti dengan Bu Dini Putri Minanti selaku direktur pertama yang mengetahui kendala eksternal dan internal yang ada di BUMDesma Besuki Beliau mengatakan bahwa:¹¹¹

“Ada beberapa kendala seperti eksternal dan internal, secara internal ya seperti kurangnya tenaga kerja atau karyawan, peralatan kerja yang kurang memadai, dan ruang kerja yang sangat sempit, kurangnya kekompakan pegawai, kurangnya unit usaha pada Bumdesma. Ya mungkin cuma itu saja mbak. Kalau kendala eksternal yang terdapat di BUMDesma Besuki ini mbak, diantaranya itu ya seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya BUMDesma dari segi ketertarikan masyarakat dalam mengikuti program-program di BUMDesma Besuki ini, lalu kurangnya pengembangan atau pengetahuan tentang keberhasilan Usaha Ekonomi Mikro, dan adanya kredit macet atau tunggakan pengembalian.”

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti kepada Pak.Siham selaku sekretaris BUMDesma Besuki, untuk mengetahui Kendala yang Dihadapi BUMDesma Besuki dalam Meningkatkan Ekonomi Sumbergempol:¹¹²

“Kalau kendala internalnya, kurangnya pegawai, peralatan kerjanya juga kurang, kemudian kantornya. sedangkan kendala secara eksternal itu seperti kurangnya kesadaran masyarakat, segi

¹¹¹ Wawancara dengan Bu. Dini Putri Minanti Direktur Utama Pengelola BUMDesma Besuki, pada hari Senin Agustus 2020, pukul 10.20 WIB.

¹¹² Wawancara dengan Pak. Siham Sekretaris Pengelola BUMDesma Besuki, pada hari Senin Agustus 2020, pukul 10.20 WIB.

ketertarikan, dan sikap masyarakat, kemudian tunggakan dana atau masyarakat yang meminjam itu tidak bisa mengembalikan pinjaman modal usaha di karenakan saat ini ter kendala oleh Covid19 untuk itu sebuah usaha di berhentikan sementara mbk dan juga masyarakat juga tidak mendapatkan penghasilan”

Kemudian di lanjutkan wawancara lagi kepada Ibu Syamsu Hidayati selaku Bedahara di BUMDesma Besuki: “apakah ada batasan maksimal pinjaman”.¹¹³

“Adanya tunggakan dari beberapa kelompok dengan data sampai per April 2020 ini adalah 354.339.000,- terjadi (Kolektibilitas II s/d V) dikarenakan sebagian besar kendala yakni adalah angsuran di anggota kelompok yang memang belum membayar dan angsuran anggota kelompok yang sudah membayar namun terindikasi macet/penyalahgunaan dana di pengurus kelompok SPP karena tidak disetorkan ke UPK. Selain dari kelompok yang sudah menunggak sebelumnya, timbul permasalahan yang sama di kelompok yang lain dan yang lain desa pula sehingga cukup menambah kembali jumlah tunggakan yang ada”.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Siti Nanik Maslakah Desa Besuki selaku salah satu anggota SPP BUMDesma, untuk mengetahui Problem eksternal dalam menjalankan usaha Ekonomi Mikro:¹¹⁴

“kendalanya banyak mbk, terkendanya usaha kami untuk saat ini terkendala oleh pemasaran, dikarenakan adanya Covid19/corona maka dari itu saya tidak bisa mengembalikan pinjama mbk. Dan pemasukan rumah tangga saya juga tidak ada sama sekali karena pemerintah menghimbau masyarakat tidak boleh beraktifitas di luar sementara”

¹¹³ Wawancara dengan Ibu. Syamsu Hidayati Bendahara Pengelola BUMDesma Besuki, pada hari Senin Agustus 2020, pukul 10.20 WIB.

¹¹⁴ Wawancara dengan Ibu. Nurul Hidayah Anggota SPP BUMDesma Besuki, pada hari Selasa 11 Agustus 2020, pukul 14.00 WIB.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti kepada Direktur utama atau ketua BUMDesma Besuki Bu Dini Putri Minanti. “Bagaimana pihak pengelola BUMDesma Besuki ini dalam mengatasi kendala eksternal dan internal tersebut”¹¹⁵.

“Solusi eksternal kami lakukan yaitu memberikan motivasi atau pembinaan masyarakat akan kesadarannya potensi yang ada pada lingkungan sehingga dapat menjadikan usaha, memberikan pengarahan kepada kelompok SPP agar Usaha berjalan dengan lancar, memberikan arahan kepada pengurus kelompok SPP agar tidak terjadi kredit macet atau tunggakan. Sedangkan solusi Internalnya yaitu Penambahan tenaga kerja, menambah keompakan pegawai, memperbesar usaha BUMDesma.”

Dari penjelasan di atas bahwa terdapat adanya promblem atau kendala yang di hadapi BUMDesma Besuki dalam mengelola SPP yaitu kendala eksternal dan internal. Kemudian dari kendala Internalnya yaitu kurangnya tenaga kerja atau pegawai, peralatan kerjanya juga kurang, kemudian kantornya. sedangkan kendala secara eksternal itu seperti kurangnya kesadaran masyarakat, segi ketertarikan, dan sikap masyarakat, kemudian tunggakan dana atau masyarakat yang meminjam itu tidak bisa mengembalikan pinjaman modal usaha di karenakan saat ini ter kendala oleh Covid19 untuk itu sebuah usaha di berhentikan sementara dan juga masyarakat juga tidak mendapatkan penghasilan lalu terjadinya kendala Usaha Ekonomi Mikro ini adanya kredit macet atau kolekbilitas IIs/dV sebesarRp. 354.339.000,- .”

C. Analisis Data

1. Pengelolaan BUMDesma Besuki dalam Peningkatan Usaha Masyarakat Ekonomi Mikro.

¹¹⁵ Wawancara dengan Bu. Dini Putri Minanti Direktur Utama Pengelola BUMDesma Besuki, pada hari Senin 10 Agustus 2020, pukul 10.20 WIB.

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Besuki merupakan badan usaha yang mengelola 10 (sepuluh) Desa diantaranya: sedayugunung, Keboireng, Besuki, Besole, Tanggulwelahan, Tanggulturus, Tanggulkundung, Wateskroyo, Siyotobagus, Tulungrejo untuk melakukan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. dengan adanya BUMDesma Besuki ini, sangat membantu para masyarakat perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan atau membutuhkan modal usaha karna di dalam pengelolaan BUMDesma Besuki ini selain memberikan pinjaman modal juga bekerjasama untuk melakukan pembinaan serta pengembangan usahanya. Mengajarkan kepada masyarakat bagaimana cara mengambil pinjaman modal yang di pinjam oleh masyarakat tersebut. Seperti pendampingan permodalan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung, dengan begitu masyarakat tersebut akan lebih terbantu dalam permodalan untuk memulai suatu usaha. Selanjutnya pihak BUMDesma juga memberikan kemitraan.

Kemudian didalam BUMDesma Besuki ini tidak ada batasan usia dengan minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun untuk bergabung di unit usaha yang dimiliki oleh BUMDesma, Kebanyakan yang bergabung sebagai anggota SPP itu ibu rumah tangga yang produktif ber wira usaha. Usaha yang di lakukan oleh anggota SPP yaitu dagang sayuran, toko klontong, pertanian, peternakan, nelayan, usaha marmer dll.

Maka dari itu, masyarakat juga sangat mendukung dan merasa terbantu dalam mendapatkan penghasilan, hal ini karena BUMDesma Besuki dapat memberikan kerjaan bagi warga masyarakat yang pengangguran dan tidak mempunyai pekerjaan agar terjadi pengurangan pengangguran yang meningkat.

Oleh dari itu dapat dikatakan bahwa pengelolaan BUMDesma meliputi 6 (enam) prinsip, yaitu :

- g) *Kooperatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- h) *Partisipatif*, semua komponen yang terlibat didalam BUMdes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- i) *Emansipatif*, semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- j) *Transparan*, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- k) *Akuntabel*, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrasi .
- l) *Sustainable*, kegiatan usaha harus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

2. Peran BUMDesma dalam Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Dilihat dari wawancara diatas bahwa peran BUMDesma Besuki dalam Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), yaitu pihak BUMDesma memberikan kegiatan sosialisasi seperti kegiatan penyuluhan wirausaha yang mana tujuannya untuk memotivasi masyarakat Besuki.

Maka dari itu Implementasinya yaitu dilakukan musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) untuk mengadakan pendirian atau pembentukan BUMDesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama) di tingkat kecamatan atau kawasan perdesaan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah antar desa tentang pengalihan aset tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam penetapan BUMDesma melalui peraturan bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMDesma.

Kemudian peran BUMDesma Besuki bisa dilihat dari pendampingan pengembangan yang bertujuan untuk mendampingi masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki serta mengembangkan usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam pengembangan usaha ini jika masyarakat yang memiliki usaha Mikro namun terbentur dalam proses pemasaran maka pihak BUMDesma Besuki ini akan membantu dalam marketing pemasarannya, agar masyarakat yang Usaha Mikro tersebut dapat mengalami peningkatan.

Dengan adanya BUMDesma Besuki ini mampu membuka lapangan pekerjaan bagi warga yang mengalami pengangguran, seperti perempuan non produktif atau tidak mempunyai pekerjaan agar bisa menambah penghasilan keluarga.

Pada upaya pendampingan tersebut masih memiliki beberapa kendala yang menghambat proses peningkatan ekonomi mikro masyarakat baik dari segi kendala eksternal maupun internal.

Kemudian dalam kepengurusan BUMDesma Besuki yakni antara lain, diantaranya Pengurus BKAD BUMDesma Besuki, Pengelola Pelaksana (Direksi) BUMDesma Besuki, Badan Pengawas BUMDESMA Besuki, Tim Verifikasi Perguliran SPP, dan yang terakhir Penasihat/Komisaris.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peran penting dari BUMDesma Besuki meliputi :

- a) membantu masyarakat dalam meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.
- b) memperkuat perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
- c) mengembangkan potensi dan kemampuan wirausaha ekonomi masyarakat desa yang mana pada umumnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

3. Kegiatan langsung Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Dari Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang memiliki kegiatan simpan pinjam. Program simpan pinjaman perempuan adalah kegiatan yang direncanakan oleh suatu lembaga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Dari suatu kegiatan Simpan Pinjam tentunya terdapat adanya mekanisme untuk pencapaian suatu proses berjalannya memberikan pendanaan. Adapun Ketentuan mekanisme yang dilakukan oleh pihak pengelola BUMDesma yaitu:

- 1) Aturan Dana Bergulir Masyarakat Berikut aturan Dana Bergulir Masyarakat di BUMDESMA Besuki:
 - a) Sistem kelompok minimal 5 orang dan maksimal 12 orang,
 - b) Simpan Pinjam Perempuan khusus untuk perempuan Usaha Ekonomi Mikro yang produktif.
 - c) Pinjaman untuk kelompok baru maksimal sebesar Rp. 2.000.000,-
 - d) Pinjaman untuk kelompok lama maksimal Rp. 7.000.000,-
 - e) 5) Batas usia minimal 17 maksimal 55.
 - f) Untuk sejumlah kredit tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu bulan tertentu yang sesuai jumlah dana pinjaman, bulan

dengan sistem angsuran 1 Bulan sekali dan jasa di bayar perbulan

g) Proses pengajuan pinjaman dana kelompok sebagai berikut:

- ✓ Mengajukan Proposal
- ✓ Verikasi Perguliran
- ✓ Pendanaan
- ✓ Pencairan dana apabila sudah di ACC

2) Ketentuan:

- a. Anggota bersedia mengangsur pinjamantepat waktu baik pokok dan jasanya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat.
- b. Bersedia bertanggungjawab secara bersama sama/tanggung renteng apabila salah satu atau beberapa anggota tidak mampu mengembalikan pinjaman pokok beserta jaminannya.
- c. Bersedia menggunakan pinjaman sesuai jenis usaha yang dijelaskan dalam proposal dan memenuhi aturan main perguliran.
- d. Tidak memidah tangankan pinjaman kepada pihak lain, jika terjadi pelanggaran maka pemanfaatan tidak bisa menghindari tanggungjawab atau pinjamannya.
- e. Pengurus kelompok bertanggungjawab terhadap kelancaran angsuran pinjaman dari anggota.
- f. Anggota bersedia membantu persyaratan yang diketahui oleh anggota keluarga/suami.

- g. Anggota kelompok atau keluarganya sebagai pemanfaat hanya boleh mengajukan pinjaman untuk satu jenis kegiatan simpan pinjam/usaha ekonomi produktif.
- h. Pengurus kelompok bersedia mengerjakan buku administrasi sebagai bukti transparansi dan pertanggungjawaban kepada kelompok.
- i. Anggota kelompok sebagai peminjam wajib mempunyai tabungan di kelompok sebagai resiko piutang dan besarnya tabungan ditentukan dalam musyawarah kelompok dan atau sesuai aturan perguliran.
- j. Apabila pemindahbukukan seluruh tabungan ini tidak mencakupi untuk melunasi sisa pokok dan jasa yang telah jatuh tempo pelunasannya, maka:
 - a) Ketua/pengurus kelompok akan menjual jaminan anggota-anggota yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dan akan memperhitungkan hasil untuk melunasi sisa pokok dan jasa kredit. Kelebihan dari jumlah tersebut akan dikembalikan kepada masing-masing yang bersangkutan.
 - b) Apabila anggota penunggak tidak memiliki jaminan atau hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa pokok dan jasa kredit, maka setiap anggota kelompok diwajibkan untuk membayar sama banyaknya sisa kewajiban tersebut. Ketua/pengurus kelompok

bertanggungjawab atas kelancaran penyetoran ini sesuai batas waktu yang disepakati dengan pihak Pelaksana Pengelola dana perguliran BUMDB Kecamatan Besuki.

- k. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar ketentuan Aturan Perguliran seperti yang diputuskan dalam MAD, Aturan Perguliran dan aturan Musyawarah Kelompok.¹¹⁶

4. Persyaratan

Permohonan Kredit Lampiran pada pengajuan atau permohonan kredit yaitu:

- a) Profil Kelompok.
- b) Daftar calon pemanfaatan dan perguliran.
- c) Rencana Angsuran kredit kelompok.
- d) RUK (Rencana Usaha Kelompok).
- e) Persyaratan kesediaan tanggung renteng dari seluruh anggota.
- f) Foto copy KTP anggota kelompok + KTP Suami/ Anggota Keluarga sebagai pihak penanggung.
- g) Surat persetujuan Suami/ Keluarga dari anggota kelompok.
- h) Berita acara Musyawarah Kelompok (lengkap dengan daftar hadir dan notulen).
- i) Foto copy bukti tabungan kelompok di Bank (jika ada).

¹¹⁶ Hasil Wawancara dari pihak BUMDESMA Kecamatan Besuki, pada hari senin 10 Agustus 2019, pukul 11.00 WIB

4. Faktor penghambat Internal dan Eksternal BUMDesma Besuki dalam Implementasi program Simpan Pinjam Perempuan.

Setiap usaha yang berjalan untuk mencapai satu tujuan pasti ada masalah yang dihadapi, tidak ada usaha yang berjalan tanpa kendala. BUMDesma Besuki ini seringkali menghadapi kendala dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Kendala tersebut yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

1) Kendala Internal:

- a) Terbatasnya Tenaga Kerja Terbatasnya tenaga kerja karena pihak BUMDesma jika ingin mengangkat karyawan baru harus adanya persetujuan-persetujuan terlebih dahulu. Maka hanya 3 (tiga) orang saja yang bekerja penuh di kantor BUMDesma Besuki dan mengatasi 1 (satu) kecamatan. Karena dengan penambahan karyawan maka akan semakin banyak pengeluaran serta akan adanya pembengkakan dalam sistem operasional dan bisa menghambat kelangsungan jalannya BUMDesma untuk kedepannya. Maka dari itu, 1 (satu) karyawan bisa mengatasi 2 (dua) atau 3 (tiga) pekerjaan unitunitnya, sehingga para karyawan tidak bisa fokus dalam mengatasi pekerjaannya.

b) Kurangnya peralatan kerja

Terbatasnya peralatan kerja seperti adanya komputer, mesin Print, dan terlalu sempitnya ruang bekerja juga dapat menjadi kendala internal. Jadi para karyawan kantor BUMDesma harus

bergantian dalam menggunakan alat-alat yang ada di kantor tersebut serta harus merasakan pengap karena ruang kantor yang terlalu sempit.

2) Kendala Eksternal

- a) Kesadaran masyarakat pentingnya unit-unit di BUMDesma Ada beberapa masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan terhadap manfaat adanya BUMDesma, mereka tidak mempunyai kesadaran bahwa dengan adanya BUMDesma kecamatan Besuki ini dapat membantu meningkatkan Ekonomi masyarakat dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga dapat bisa mendirikan usaha Ekonomi Mikro.
- b) Sikap dan Ketertarikan Masyarakat terhadap BUMDesma Masyarakat cenderung tidak mau tau tentang apa itu BUMDesma, menyepelekan keberadaan BUMDesma. Terkadang masyarakat tidak terbuka hatinya untuk tertarik bekerjasama dengan BUMDesma Besuki mereka takut jika nantinya hanya akan dimanfaatkan oleh BUMDesma untuk keberhasilan pihak BUMDesma itu sendiri.
- c) Kendala pada unit usaha simpan pinjam Dalam unit simpan pinjam juga terdapat kendala yaitu terjadinya tunggakan seperti tunggakan macet pada per April 2020 koleabilitas II s/d V angsuran pokok menunggak lebih 6 kali angsuran, tunggakan yang

tidak bisa dikendalikan, dan tunggakan yang memang benar-benar parah, yang menyebabkan karena usaha tidak lancar, penyalahgunaan oleh anggota atau kelompok yang tidak bertanggung jawab serta adanya penghambat usaha adanya Covid19. Contohnya dari anggota sudah dibayarkan ke ketua kelompok, tetapi dari pihak ketua kelompok tidak disetorkan ke kantor BUMDesma.

Tabel 4.4
Unit Pengelolaan
Laporan Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman
BUMDesma Kecamatan Besuki
Periode s/d 30 April 2020

No	Desa	Pinjaman Bulan April	Angsuran Menunggak II s/d V	
			Angsuran Pokok Menunggak 1 S/d 2 kali Angsuran kolek II	Angsuran Pokok Menunggak Lebih dari 6 kali Angsuran kolek V
1.	Sedayugunung	-	-	-
2.	Keboireng	61.900.000	10.000.000	-
3.	Besuki	162.400.00	20.950.000	-
4.	Besole	404.259.000	17.505.000	306.754.000
5.	Tanggulwelahan	14.500.000	2.900.000	-
6.	Tanggulturus	46.360.000	6.700.000	13.560.000
7.	Tanggulkundung	45.470.000	1.500.000	2.600.000
8.	Wateskroyo	43.390.000	10.400.000	4.990.000
9.	Siyotobagus	194.860.000	26.100.000	4.060.000
10.	Tulungrejo	42.800.000	4.400.000	-
TOTAL		1.015.939.000	100.455.000	331.964.000

Sumber: Laporan SPP Kolektibilitas April 2020 BUMDesma Besuki

Adapun tindak lanjut yang dilakukan BUMDesma Besuki dalam mengatasi penunggakan tersebut adalah:¹¹⁷

- 1) Mengkonfirmasi kepada pengurus kelompok untuk penanganan masalah tunggakan secara lebih intensif,
- 2) Mensosialisasikan kepada semua kelompok terkait jatuh tempo daripada seperti biasanya,
- 3) Tim kecamatan berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa terkait permasalahan tunggakan tersebut agar bisa segera teratasi,
- 4) Dibentuk Tim Penanganan Masalah untuk pencapaian progres yang lebih baik,
- 5) Melakukan penagihan bersama Tim Penanganan Masalah kepada peminjam yang menunggak,
- 6) Menindaklanjuti progres penyelesaian tunggakan jika tidak bisa kunjung selesai untuk dilakukan proses yang lebih lanjut,
- 7) Dilakukan klasifikasi diantara kelompok-kelompok yang bermasalah sehingga bisa dilakukan penanganan yang berbeda pula agar ada hasil yang lebih efektif,
- 8) Sudah diberikan surat peringatan kepada kelompok, dan surat sudah melalui tembusan Camat, Kapolsek dan Kepala Desa terkait,
- 9) Melibatkan pihak berwajib dalam hal ini adalah babinkamtibmas Desa dalam rangka proses koordinasi penanganan masalah.

¹¹⁷Wawancara Pengelola pihak BUMDesma Besuki, pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020